

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Kegiatan	: Operasional Laboratorium
Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran	: 2020

1.1 LATAR BELAKANG

Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi mutu pekerjaan konstruksi. Dalam rangka mengendalikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan harus didukung melalui sistem pengujian berupa quality control dan collecting data sehingga kualitas pekerjaan dapat dikendalikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diharapkan.

Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan quality control dan collecting data menjadi tolak ukur bagi perkembangan kualitas kegiatan konstruksi dilingkungan Dinas pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Kapasitas unit Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan perlu dimanfaatkan/ digunakan seoptimal mungkin, mengingat tersedianya alat-alat Laboratorium dan tenaga yang terampil, Pemanfaatan laboratorium ditujukan untuk menunjang kualitas fisik dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan baik pekerjaan yang ditangani Pemerintah, Swasta maupun Perorangan. Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian

Konstruksi dengan menganut prinsip komersial dengan lebih mengutamakan fungsi pelayanan dan mendorong partisipasi bidang konstruksi untuk melakukan uji mutu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan operasional laboratorium meliputi pengujian mutu pekerjaan konstruksi.

Tujuan dari kegiatan adalah :

1. Melakukan pengambilan contoh material pada sumber yang letaknya tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan pengujian pada pekerjaan konstruksi di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Memberikan laporan pengujian pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan.

1.3 SASARAN

Memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa, Penyedia jasa, Konsultan dan masyarakat khususnya bidang Pelayanan Pengujian mutu Konstruksi, sehingga terwujudnya pekerjaan yang berkualitas dan pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Menteri Departemen dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
6. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan ,penerapan dan pengawasan Nasional Indonesia
7. Dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/IN/M/1991, dimana setiap unsur PU dan Rekanan terkait (Konsultan/Kontraktor) diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan standar-standar bidang Ke-PU-an
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 546 /KPTS/1986 tanggal 17 november 1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan unit Laboratorium di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
9. Surat Menteri Keuangan No. S-1037/NK-011 tanggal 15 september 1986 perihal Persetujuan tentang Pemanfaatan Unit Laboratorium oleh Pihak Ketiga dan Tarif Jasa/Sewa

1.5 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan laboratorium pengujian konstruksi adalah :

1. Melakukan pengambilan contoh material pada sumbernya yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan rangkaian pengujian pada pekerjaan konstruksi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan adalah :

1. Hasil Pengujian Material
2. Perencanaan campuran material

1.7 OUTCOME KEGIATAN

Outcome Kegiatan adalah :

Meningkatnya mutu pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.

1.8 CAPAIAN KEGIATAN

Capaian kegiatan adalah :

Terlaksananya pekerjaan konstruksi yang bermutu.

1.9 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020 (Januari – Desember 2020) yang jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Dibuat Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Bina Marga



DIGDIAN BUDIMAN D, ST
NIP. 19770610 200902 1 004

